

**PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**FARADINA HUSAIN
E1119159**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

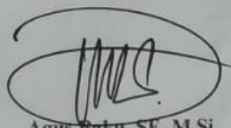
**PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**FARADINA HUSAIN
E1119159**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah DiSetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Gorontalo, 05 November 2021

PEMBIMBING I

Agus Baku, SE., M.Si
NIDN : 09 010886 01

PEMBIMBING II

Kartini Muslimin, SE., M.Ak
NIDN : 09 131276 01

**PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Purnama Sari, SE.,M.Si
2. Sulfianty, SE.,M.Si
3. Taufik Udango, SE.,M.Ak
4. Agus Baku, SE.,M.Si
5. Kartini Muslimin, SE.,M.Ak

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


 Dekan Fakultas Ekono
 2
 Alif Safir, SE., M.Si
 No: 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN : 09.200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 22 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



Faradina Husain

E1119159

ABSTRAK

FARADINA HUSAIN. E1119159. PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) secara Simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan metode analisis Regresi berganda dengan responden sebanyak 31 responden yang terdiri dari 31 Pegawai Negeri Sipil dan 8 responden calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan yang meliputi Akuntansi berbasis Akrual dan sistem pengendalian intern dengan Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dimana $\alpha = 0,05$ dan $df n - 2$ atau $38 - 2 = 36$ diperoleh F hitung sebesar $0,597 > sig.$ Sebesar $0,000$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kontribusi akuntansi Berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato yang sebesar $0,597$ atau $59,70\%$ (besar) dan $0,403$ atau $40,30\%$ dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

FARADINA HUSAIN. E1119159. THE EFFECT OF ACCRUAL-BASED ACCOUNTING AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS AT THE REGIONAL FINANCIAL AGENCY OF POHUWATO REGENCY

All rights and obligations in the context of administering regional government can be valued in money, including all forms of wealth related to the rights and obligations of the region. The research objectives are (1) finding the partial effect of accrual-based accounting on the quality of financial statements, and (2) finding out to what extent the effect of the internal control system, partially on the quality of financial statements, and (3) to determine to what extent the effect of accrual-based accounting and the internal control system simultaneously on the quality of financial statements. The study employs a multiple regression analysis with 31 respondents consisting of 31 civil servants and 8 prospective civil servants. Based on the results of this study, it is indicated that accrual-based accounting and internal control systems affect the quality of financial statements at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency where $\alpha = 0.05$ and $df\ n - 2$ or $38 - 2 = 36$ with F count of $0.597 > \text{sig. of } 0.000$. It means that H_0 is rejected, and H_a is accepted. The contribution of accrual-based accounting and internal control systems to the quality of financial statements at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency is 0.597 or 59.70% (large). The value of 0.403 or 40.30% is influenced by other variables.

Keywords: accrual-based accounting, internal control system, quality of financial statements

KATA PENGANTAR

Sebagai hamba yang beriman dan percaya akan kekuasaan dan kebesaran-Nya, maka patutlah penulis ucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”. Segala upaya dan perjuangan yang keras serta berbagai tantangan, terutama dalam pengumpulan literatur yang diperlukan dalam penulisan.

Oleh karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak.,CSRS, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengatahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Agus Baku, SE, M.Si selaku Pembimbing I, dan Ibu Kartini Muslimin, SE., M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada orang tua serta keluarga yang telah membantu/mendukung saya, serta Bapak Ibu dosen, staf administrasi Universitas Ichsan Gorontalo dan rekan – rekan seperjuangan terutama mahasiswa akuntansi yang telah membantu dalam proses perkuliahan sampai dengan ujian skripsi,

Akhir kata, semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gorontalo,.....2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2 .Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Penelitian	9
1.4.2. kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrua.....	10
2.2. Tujuan Akuntansi Berbasis Akrua	12
2.3. Sistem Pengendalian Intern.....	13
2.4. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	15
2.5. Unsur – unsur Pengendalian Intern	15
2.5.1. Lingkungan Pengendalian.....	15
2.5.2. Penilaian Resiko	19

2.6. Kualitas Laporan Keuangan.....	21
2.6.1. Tujuan Laporan Keuangan.....	27
2.6.2. Kendala Informasi Laporan Keuangan.....	28
2.7. Kerangka Pemikiran	29
2.8. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Obyek Penelitian	33
3.2. Sumber Data.....	33
3.3. Populasi.....	34
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5. Metode Analisis.....	36
3.5.1. Uji Hipotesis	36
3.5.2. Uji t.....	37
3.5.3. Uji F	37
3.6. Operasional Variabel Penelitian	38
BAB IV PEMBASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.2. Analisis Deskriptf Kuantitatif	69
4.2.1. Analisis Deskriptf Kuantitatif Variabel X1	70
4.2.2. Analisis Deskriptf Kuantitatif Variabel X2	72
4.2.3. Analisis Deskriptf Kuantitatif Variabel Y	75
4.3. Pembahasan Analisis Regresi	77
4.3.1. Hasil Uji-t.....	78
4.3.2. Hasil Uji F.....	78
BAB V KASEIMPULAN.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Operasional Variabel	39
Tabel 4.1 Rentang Skala	70
Tabel 4.2 Tanggapan Responden X1 Item 1	71
Tabel 4.3 Tanggapan Responden X1 Item 2	71
Tabel 4.4 Tanggapan Responden X1 Item 3	72
Tabel 4.5 Tanggapan Responden X2 Item 1	72
Tabel 4.6 Tanggapan Responden X2 Item 2	73
Tabel 4.7 Tanggapan Responden X2 Item 3	73
Tabel 4.8 Tanggapan Responden X2 Item 4	74
Tabel 4.9 Tanggapan Responden X2 Item 5	74
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Y Item 1	75
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Y Item 2	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Kegiatan	83
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian	84
Lampiran 3	Tabulasi Hasil kuesioner	88
Lampiran 4	Frekuensi Tabel.....	91
Lampiran 5	Hasil Output Regresi	96
Lampiran 6	Surat Keterangan Penelitian	100
Lampiran 7	Surat Balasan Penelitian	101
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	102
Lampiran 9	Hasil Turnitin	103
Lampiran 10	<i>Curriculum Vitae</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

sistem akuntansi memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban (*stewardship and accountability process*), manajerial dan unsur pengendalian manajemen di pemerintah daerah, reformasi regulasi keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan daerah termasuk keuangan negara, yaitu : ”semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” yang antara lain, hak daerah memungut pajak dan retribusi, mengelola penerimaan dan mengeluarkan belanja daerah yang pada akhirnya semuanya itu dilimpahkan penanggungjawabannya ke daerah masing-masing (Bahrullah Akbar,2011).

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengucualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK.

Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah

menyebabkan semakin dibutuhkannya pelaporan keuangan yang berkualitas, selain peningkatan kuantitas keuangan yang dikelola pemerintah, terjadi pula peningkatan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah, hal ini antara lain tercermin dari adanya transaksi transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, selain terjadinya peningkatan kuantitas dan kompleksitas keuangan negara tersebut, tantangan pengelolaan keuangan negara ke depan juga akan semakin berat, hal ini terutama terkait dengan rencana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan K/L, penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun-tahun pertama pelaksanaan tidak mengurangi kualitas laporan keuangan secara signifikan (Agus Martowardojo, 2010).

Pemerintah diduga telah melanggar ketentuan UU Keuangan Negara untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, demikian laporan dari BPK kepada DPR, padahal sesuai ketentuan UU Keuangan Negara nomor 17/2003, pemerintah harus mampu menerapkan hal ini paling lambat 5 tahun sejak UU tersebut diberlakukan, tapi laporan dari ketua BPK kepada DPR mengatakan bahwa pemerintah belum menjalankan penerapan standar akuntansi berbasis akrual hingga tahun 2011, yang notabene merupakan tahun kedelapan untuk pelaksanaan UU tersebut, kita sudah melewati batas waktu dalam UU, namun pemerintah masih belum menerapkan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual, dalam mendorong pemerintah

dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tanpa mengabaikan kemampuan pemerintah di pusat dan daerah, kesiapan SDM dan teknologi agar dipertimbangkan secara seksama, sehingga nantinya penerapan tersebut tidak menurunkan pencapaian opini atas kewajaran laporan keuangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlakuan penyusutan aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, penerapan SAP berbasis akrual juga perlu dipertimbangkan perlakuan penyusutan terhadap aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, hal ini diyakini akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah (Hadi Poernomo, 2012).

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi, salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas" (Binsar Simanjuntak, 2010).

Implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM), kondisi yang

ada pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi berbasis akrual, karena standar akuntansi berbasis kas menuju akrual masih relatif baru diterapkan dan untuk beberapa pemerintah daerah masih dalam proses sosialisasi, hal ini juga terlihat masih banyak laporan keuangan kementerian negara/ lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini audit kurang baik dari BPK, yaitu tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) bahkan ada yang tidak wajar (*adverse*) (IAI,2010).

Rencana pemerintah menerapkan sistem akrual dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) tahun 2013, masih menyisakan keraguan di kalangan pemerintah sendiri, dengan menerapkan sistem ini ada kekhawatiran dapat menurunkan pencapaian opini hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahunan, pemerintah dianggap belum siap melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual karena khawatir akan mendapatkan opini TMP (tidak memberikan pendapat), karena dengan sistem akuntansi berbasis kas dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2011 hanya mendapatkan opini WDP (wajar dengan pengecualian), jadi dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ada beberapa aspek kelemahan meliputi belum sinkronnya peraturan perundangan baik secara horisontal dan vertikal, keterbatasan SDM, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya sumber pendanaan, dengan adanya kontrol yang baik antar bagian serta informasi yang lebih akurat merupakan sistem yang baik dan cocok untuk mendukung terciptanya sebuah pengelolaan keuangan yang baik (*good governance*) dan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas serta komprehensif merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya

transparansi dan akuntabilitas publik (Binsar Simanjuntak,2010).

Terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan adalah merupakan hal mutlak diwujudkan oleh seorang kepala daerah, hal tersebut tersirat dalam Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri laporan keuangan pemerintah daerah, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan suatu upaya intensif yang dilakukan secara berkesinambungan, pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP

tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga (Isye,2012).

Unsur-unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan

melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali, integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan, oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti, dengan berbudaya SPIP, pendekatan yang digunakan dalam pengawasan berbasis pada *soft control* dimana unsur manusia (SDM) menjadi subjek aktif, disamping pula *hard control* yang mengandalkan keberadaan peraturan dan pimpinan menjadi unsur utama, dengan SPIP ini nantinya dapat tercipta sistem yang akan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, dan walaupun tindakan tersebut akhirnya terjadi, hal tersebut dapat terdeteksi sejak dini (Mardiasmo,2011).

Isu tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya, beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian internal pemerintahan (Syukriy,2008).

Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntansi Berbasis Akreal dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato?
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato?
3. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato?

1.3. Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pembahasan penulis, yaitu tentang akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato

1.3.2. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) secara Simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKD kabupaten pohuwato.

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan yakni BKD kabupaten pohuwato dalam memecah permasalahan pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap Kualitas laporan keuangan

1.4.2 Kegunaan akademisi

Sebagai pengembangan ilmu akuntansi dan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji dalam bidang ilmu yang sama secara lanjut dan mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual

Ada beberapa definisi akuntansi berbasis akrual, yaitu : Menurut Nunuy (2007:17) : “Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas”. Sedangkan Abdul halim , (2007:49) menyatakan : “Akuntansi berbasis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setra kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”. Dan Menurut Hoesada (2010:119) : “Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi pada saat pendapatan atau beban muncul, tanpa mempedulikan kapan kas dibayar atau diterima tunai, dengan tujuan membandingkan beban yang terjadi pada suatu periode dengan manfaat (*benefit*) diterima tunai dalam periode tersebut. Akuntansi akrual mengakui (1) aset yang diperoleh secara kredit (bukan tunai) pada dua sisi neraca, yaitu aset dan kewajiban, dan (2) penghasilan / pendapatan berbentuk tagihan. Sebagai konsekuensi selanjutnya, akuntansi akrual mencatat peristiwa pembayaran hutang (dengan tunai) dan penerimaan piutang (dengan tunai) sebagai peristiwa akuntansi”.

Menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) :

“Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses”.

Basis akrual menurut PSAP 01 adalah: “Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.

Menurut SAP berbasis akrual dalam Abdul (2012:24) menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu :

a. Pengakuan pendapatan

1. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Pengakuan beban dan belanja

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah atau entitas pelaporan.

2.2 Tujuan Akuntansi Berbasis Akrua

Tujuan dari basis akrual meliputi :

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dalam penganggaran, akuntansi dan pelaporan
- b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset
- c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
- d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan
- e) Mereformasi sistem anggaran belanja
- f) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

Dari tujuan diatas IFAC menyatakan manfaat dari penerapan basis akrual dalam akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di sektor publik, yaitu :

- a) Basis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- b) Basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan mengevaluasi kemampuan pemerintah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen-komitmennya
- c) Akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan perubahan atas posisi keuangan tersebut
- d) Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan

keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki berguna dalam melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah melalui service cost, efisiensi, dan pencapaian kinerja.

Manfaat lain dari basis akrual yaitu :

- a) Memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas
- b) Memungkinkan pengguna laporan menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas
- c) Memungkinkan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas
- d) Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
- e) Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmentennya;
- f) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
- g) Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
- h) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

2.3 Sistem Pengendalian Intern

Ada beberapa pengertian tentang sistem pengendalian intern yaitu : Menurut Permendagri no 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, yaitu: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah: “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah”.

Menurut Areens (2000:824), yaitu : *“Internal control system that is a set designed procedure and policy for the management with adequate confidence that target believe important will reach”*.

Yang artinya : " Sistem pengendalian Intern yang terdiri dari kebijakan kebijakan dan prosedur-prosedur dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi suatu usaha dapat dicapai”.

Menurut Permendagri no 60 tahun 2008 tentang sitem pengendalian intern pemerintah : “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh

di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah “.

2.4 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Arens (1996:66), yaitu: “ 1. Menyejikan data yang dapat dipercaya, Mengamankan aktiva dan pembukuan, Meningkatkan efisiensi operasional, dan Mendorong pelaksanaan kebijakan yang ada “. Menurut mulyadi (2001:44), tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu :Melindungi harta milik perusahaan, Memeriksa kecermatan dan kehandalan data akuntansi, Meningkatkan efisiensi usaha, dan Mendorong ditaatinya kebijakan yang telah digariskan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya sistem pengendalian intern (SPI), yaitu :

- a. Perkembangan kegiatan dan skala (kompleksitas)
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan
- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan pada manusia
- d. Pengawasan yang “*built-in*” langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat

2.5 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PERMENDAGRI no 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

2.5.1 Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1) Penegakan integritas dan nilai etika;

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
- b. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- c. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- d. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi;

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam

Instansi Pemerintah;

- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 - d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- Kepemimpinan yang kondusif sekurang - kurangnya ditunjukkan dengan:
- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
 - d. melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
 - f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
 - f. Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- c. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa pelaksanaan

wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
- b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
- c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- d. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia berpedoman pada peraturan perundangundangan.

- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2.5.2 Penilaian risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko terdiri atas:

1) Identifikasi risiko;

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

2) Analisis risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima

3) Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Penaksiran Risiko

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Risiko dapat timbul dan berubah secara wajar pada kondisi sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan
- b. Karyawan baru
- c. Sistem informasi baru
- d. Pertumbuhan yang pesat
- e. Teknologi baru
- f. Lingkungan, produk atau kegiatan baru
- g. Restrukturisasi perusahaan
- h. Operasi perusahaan secara internasional
- i. Keputusan akuntansi

2.6 Kualitas Laporan Keuangan

Adapun definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Menurut Mahmudi (2003:77) : “Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”. Menurut Baridwan (2000: 17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan” . sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “ Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan operasinal pemerintahan, menilai kondidi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang.

Komponen laporan keuangan lengkap menurut SAP berbasis akrual sesuai PP no.71/2010 dalam Abdul hafiz (2012:11), yaitu :

- 1) Laporan realisasi anggaran (LRA)
- 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL)

- 3) Neraca
- 4) Laporan operasional (LO)
- 5) Laporan arus kas (LAK)
- 6) Laporan perubahan ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas laporan keuangan (CaLK) “.

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Government Accounting Standard Board (2009:54) adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya
2. Melaporkan hasil operasi
3. Melaporkan kondisi keuangan
4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang ”.

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian

terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.

Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai:

1. Pengurusan dan ketaatan
2. Kondisi keuangan
3. Kinerja
4. Dampak ekonomi

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Kategori karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Indra Bastian (2003:48):

- a. Kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna
- b. Kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)
- c. Kualitas sekunder; konsisten, komparatif

d. Kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat “.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Payamta:2006:83). Kualitas laporan keuangan sangat menentukan apakah informasi yang terkandung didalamnya lebih berdaya guna bagi pemakai laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi persyaratan umum dan kualitatif sebagaimana telah dinyatakan dalam PSAK (Chairol:2001:6). Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Kualitas laporan keuangan sangat menentukan apakah informasi yang terkandung didalamnya lebih berdaya guna bagi pemakai laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh

laporan keuangan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki 4 persyaratan normatif yakni :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Kualitas laporan keuangan menurut Fanani (2008) dalam Sri Nurul Fajri (2013:4): “Merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan “. Menurut Ratih (2010: 16) : “Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya”. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Menurut Abdul hafiz (2012:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan syarat dapat dikatakan berkualitas, yaitu :

1. Relevan, jika informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

2. Andal, jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna “.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem atau proses akuntansi tidak dapat dibuat secara mudah, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti.

2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
3. kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
4. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
5. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
7. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
8. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

2.6.2 Kendala Informasi Laporan Keuangan Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi yang tersaji dalam laporan keuangan adalah keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan- alasan kepraktisan.

Ada 3 hal yang menimbulkan kendala dalam laporan keuangan pemerintah menurut Abdul (2012:18), yaitu :

- 1) Materialitas, walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dikatakan materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- 2) Pertimbangan biaya dan manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi sseharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
- 3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif, Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah “.

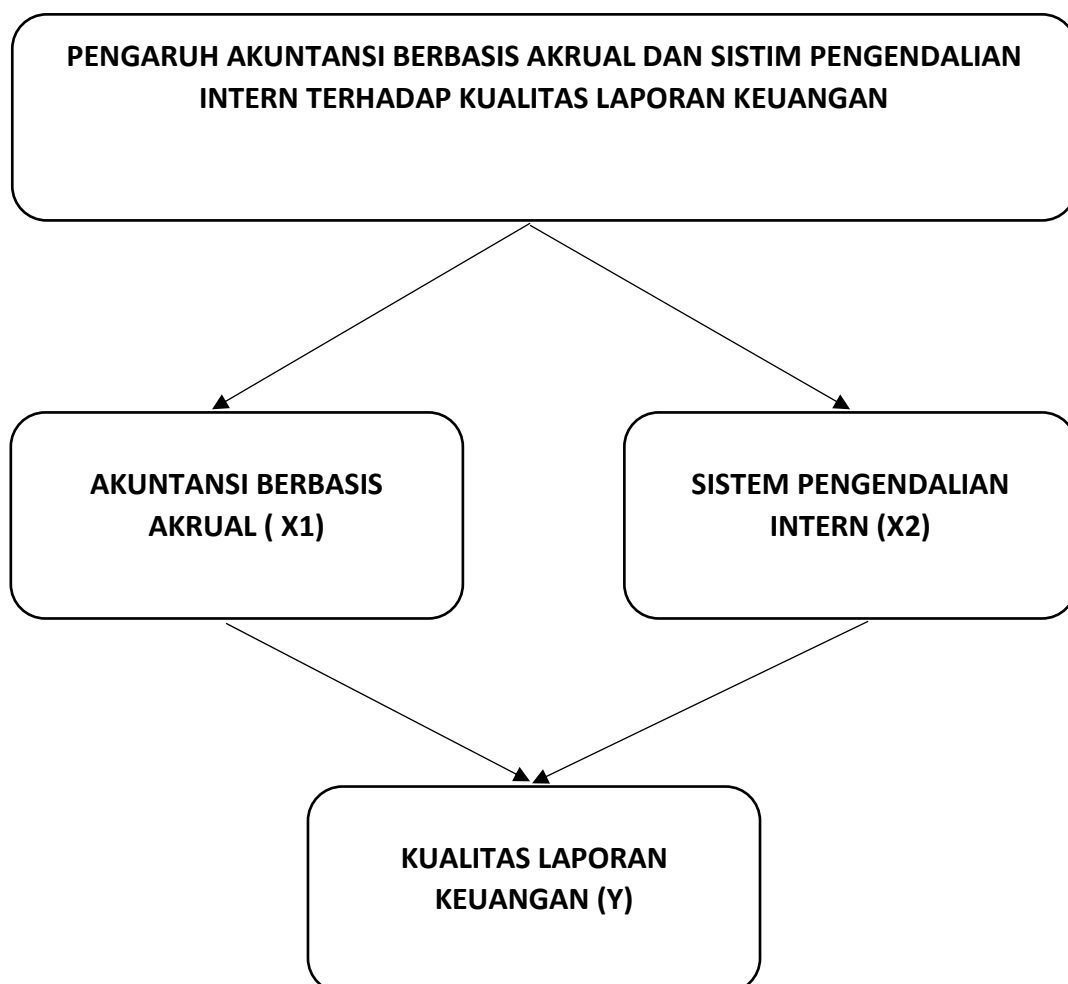
2.7 Kerangka Pemikiran

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah

di Indonesia adalah hal yang baru. Akuntansi berbasis akrual ini baru saja dikeluarkan peraturannya melalui SAP berbasis akrual. Yang dulunya diatur dalam PP no.24 tahun 2005, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dikaji ulang dalam PP no.71 tahun 2010. SAP berbasis akrual ini dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa lebih akurat, relevan dan dapat lebih transparan, karena dianggap akuntansi berbasis kas tidak transparan karena akuntansi ini hanya memunculkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas, sedangkan akuntansi berbasis akrual tidak memperhatikan kas ataupun setara kas, akuntansi ini juga mencatat transaksi-transaksi saat terjadinya peristiwa, bukan saja saat ada kas yang masuk atau keluar. Sehingga dianggap lebih dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk memenuhi sebuah laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan komponen lain, salah satunya yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), ada 5 unsur dari SPIP sendiri yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Lima unsur ini saling terjalin erat satu dengan yang lainnya dan diharapkan dapat mengontrol setiap peristiwa yang terjadi dipemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Dengan adanya SPIP ini juga diharapkan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBD) sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Setiap LKPD yang memenuhi empat kriteria ini dianggap telah mempertanggungjawabkan

anggaranannya dengan benar, dan pertanggungjawaban ini diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung adanya pengelolaan yang akuntabilitas dan terbuka dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan uraian diatas dan landasan teori, maka disusun suatu model penelitian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Model penelitian tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Dan variabel lainnya sebagai variabel independen yakni antara lain : akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

2.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”.

Sugiyono (2018:38) mendefinisikan objek penelitian adalah sebagai berikut: Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern (SPI) dan kualitas laporan keuangan.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang diuraikan berupa data primer dan sekunder. Data sekunder berupa antara lain:

a) Data Primer (primary data)

Data primer menurut Umi Narimawati (2018:98) Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana

mendapatkan informasi ataupun data”.

b) Data Sekunder (secondary data)

Pengertian data sekunder menurut Umi Narimawati (2018;94) bahwa : Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data. Data sekunder yang digunakan berupa IHPS, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, artikel-artikel, jurnal-jurnal.

3.3 Populasi

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif, karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya. Menurut Sugiyono (2018:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Yang dijadikan populasi pada penelitian ini adalah pegawai badan keuangan daerah kabupaten pohuwato terdiri dari 23 PNS dan 8 CPNS.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka sumber pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat objek penelitian, terdiri dari :

a. Observasi (*Observation*)

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap data-data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan situasi serta kondisi yang dihadapi oleh instansi pada waktu penelitian berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen, catatan dan laporan mengenai data yang berhubungan dengan penelitian.

d. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam mendukung penelitian ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Studi Dokumentasi (*Collecting Document*)

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

3. Studi Pustaka

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku, penelitian lain dan laporan yang diduplikasikan yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian yang dianalisis untuk memperoleh data sekunder.

3.5 Metode Analisis

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan keuangan daerah kabupaten pohuwato.

3.5.1 Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Model statistik yang dipakai adalah model regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear berganda juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependen), (kualitas laporan keuangan)

X_1 = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent), akuntansi berbasis akrual

X_2 = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent), sistem pengendalian intern

a = Konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor kualitas laporan keuangan

e = *Standar Error*

3.5.2 Uji t

Pengujian koefisien regresi secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probability value (tingkat signifikansi) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan probability value hasil penelitian. Dengan tingkat signifikansi (probability value) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Jika *probability value* hasil penelitian $<$ *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif.
2. Jika *probability value* hasil penelitian $>$ *probability value* peneliti (0,05) , maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

3.5.3 Uji F

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen (Algifari, 2000). Untuk itu perlu dilakukan uji ANOVA atau uji F.

Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Tingkat signifikansi untuk penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05.

Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila *probability value* hasil penelitian $<$ *Probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternative

Apabila *probability value* hasil penelitian $>$ *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Operasional Variabel penelitian merupakan penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran (Umi Narimawati, 2008: 21).

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 58). Jadi, operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- Akuntansi berbasis akrual
- Sistem pengendalian intern
- Kualitas laporan keuangan

Dalam penelitian ini operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntansi berbasis akrual	Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas yang diterima atau dibayar).	1. Pengakuan 2. pencatatan 3. pengukuran	1. Pendapatan 2. Belanja 3. Beban 1. Kewajiban 2. Aset Pengukuran dilakukan dengan nilai perolehan historis	Ordinal

Abdul (2012:24)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
Sistem pengendal	Sistem pengendalian intern	1. Lingku ngan	1. Penegakan Integritas Nilai Etika	ordinal

<p>i an internal</p>	<p>adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komitmen terhadap Kompetensi 3. Kepemimpinan yang Kondusif 4. Memiliki Struktur Organisasi 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Resiko 2. Analisis Resiko 1. Review atas instansi pemerintah yang bersangkutan 2. Pembinaan SDM 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas asset 5. Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 9. Pembatasan akses atas 	

			<p>sumber daya dan pencatatannya</p> <p>10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya</p> <p>11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting</p>	
		4. Informasi dan komunikasi	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus	
		5. Pemantauan	Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern	

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan.	1. Relevan	<p>a. Memiliki umpan balik</p> <p>b. Memiliki manfaat prediktif</p> <p>c. Tepat waktu</p> <p>d. Lengkap</p>	Ordinal
		2. Andal	<p>a. Penyajian jujur</p> <p>b. Dapat diverifikasi</p> <p>c. Netralitas</p>	

		3. Dapat dibandingkan	Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal	
		4. Dapat dipahami	Batas pemahaman para Pengguna	

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Penelitian dan Pembentukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Satuan kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, di arahkan pada terwujudnya tata kelola keuangan yang tertib, taat azas, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja tata kelola keuangan dan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah Profil BKD ini. Buku Profil ini disusun secara sederhana untuk lebih memudahkan dalam

Sebagai salah satu satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, Satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah satuan organisasi yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah melalui tata kelola keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik tersebut, diperlukan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang tepat, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas pelayanan keuangan terbaik. Disamping itu, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu konsukwensi penting dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan pada organisasi BKD.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja pelayanan satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato, serta sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah Profil BKD ini. Sebelumnya, dapat digambarkan sejarah singkat berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai berikut :

Periode perjalanan waktu sampai dengan terbentuknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, adalah sebagai berikut :

a. Periode tahun 2003 – 2004.

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada bulan Oktober tahun 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato masih dalam bentuk APBD Mini yang merupakan pelimpahan sebagian anggaran dari APBD kabupaten induk Kabupaten Boalemo. Organisasi pengelola keuangan ini adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

b. Periode tahun 2004 – 2006

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato berada dibawah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, sedangkan pengelolaan pendapatan daerah dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

c. Periode tahun 2006 – 2008

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, maka pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat BPKD. Dalam pelaksanaannya, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah dilebur menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dipimpin oleh Kepala BPKD : Drs. H. Amin Haras

d. Periode tahun 2008 s/d 2013

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 01

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD. Perbedaan antara periode sebelumnya adalah sejak tahun 2008, pengelolaan aset daerah yang sebelumnya ditangani oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya dilebur dan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi BPKAD.

e. Periode tahun 2013 s/d 2016

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, terjadi perampingan organisasi yakni BPKAD yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) bidang selanjutnya menjadi 3 (tiga) bidang. Bidang yang dirampingkan adalah bidang pendapatan. Bidang Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja BPKAD.

f. Periode 2017 s/d sekarang

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan OPD baru Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 Bidang.

Berdasarkan periode tersebut diatas, yang pernah menjabat kepala keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Periode Tahun 2006 s.d 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) : Bpk. Drs. Amin Haras,
2. Periode Tahun 2008 s.d 2010 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Bpk. Hi. Drs. Amin Haras,
3. Periode Tahun 2010 s.d 2012, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Alm. Bpk. Hi. Arifin Mbuinga, S.Pd.
4. Periode Tahun 2012 s.d 2016 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Drs. Hi. Achmad Djuuna.
5. Periode Tahun 2017 Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) : Iskandar Datau, S.Sos, M. Si

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

Misi

1. Meningkatkan SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas
2. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan keuangan daerah dengan mengedepankan supremasi hukum
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi

4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Perangkat daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyelenggarakan pembinaan keuangan daerah;
3. Menyusun pedoman, rancangan dan perhitungan anggaran sebagai bahan penyusunan RAPBD dan perubahan RAPBD;
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah daerah;
5. Menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
7. Melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan sebagaimana tersebut diatas, dirinci lebih lanjut atas tugas dan fungsi pada setiap tingkat jabatan masing-masing sesuai struktur organisasi BKD Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut :

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekertaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan kesekretariatan, penyusunan rencana program, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris badan memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan;
4. Menjalankan sebagian fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yakni Fasilitasi penyaluran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan;
5. Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan
6. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan; dan,
7. pelaksanaan fungsi sesuai tugas dan kewenangan

Sekretaris badan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian dan umum, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan. Tugas dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian kepegawaian dan umum memiliki tugas pokok membantu sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan rumah tangga Badan, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha (persuratan, kearsipan, dokumentasi) dan rumah tangga Badan,
- 2) Penyiapan pelaksanaan urusan perlengkapan (pengadaan, pengelolaan, penatausahaan dan pemeliharaan) barang inventaris Badan,
- 3) Penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan,
- 4) Penyiapan perencanaan, pengembangan pegawai,
- 5) Penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan analisis beban kerja organisasi, penyusunan uraian tugas,
- 6) Penyiapan bahan analisis jabatan, peta jabatan, dan perencanaan kebutuhan pegawai,
- 7) Penyiapan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai,
- 8) Penyiapan bahan penegakan disiplin, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
- 9) Pengelolaan urusan kepegawaian,
- 10) Pelaksanaan tugas humas, keprotokoleran,
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris

b. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu sekretaris melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pelayanan administrasi

program, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis,
- 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Badan,
- 3) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan,
- 4) Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Tahunan, Rencana Strategis, Rencana Kerja,
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekertaris

c. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan memilki tugas pokok membantu sekertaris melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Badan, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 2) Penatausahaan Keuangan, verifikasi dan pengendalian anggaran;
- 3) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan keuangan Semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun serta Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan;
- 4) Penyediaan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan;
- 5) Penyediaan bahan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan sekertaris

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran, memiliki fungsi :

- a. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis anggaran;
- b. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD dan perubahannya;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- e. Penyusunan Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- f. Penyusunan bahan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran serta Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di pimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memiliki fungsi :

1. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Penyediaan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 3. Penyediaan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Perubahannya;
 4. Penyediaan bahan pengantar dan nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD;
 5. Penyediaan bahan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 6. Penyediaan bahan rancangan regulasi atau kebijakan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dan perubahannya;
 7. Penyediaan bahan analisa standar belanja dan standar satuan harga umum;
 8. Penyediaan bahan rapat-rapat pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran;

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran dipimpin oleh Kepala

Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam Sub Bidang pelaksanaan dan pengendalian anggaran, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran;
 - 2) Penyediaan bahan perhitungan dan penyesuaian pembayaran gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Penyediaan bahan penelitian ketersediaan anggaran, kesesuaian penggunaan kode akun, kesesuaian perhitungan pembayaran serta kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 4) Penyediaan bahan penyusunan sumber dana APBD dan sumber dana Perubahan APBD;
 - 5) Penyediaan bahan penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) APBD;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- c. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;

Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;

- 2) Penyediaan bahan sarana dan prasarana aplikasi keuangan daerah;
- 3) Penyediaan bahan pengendalian penggunaan aplikasi keuangan daerah;
- 4) Penyediaan bahan sistem pengamanan dan penyimpanan data base aplikasi keuangan daerah;
- 5) Penyediaan bahan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan aplikasi keuangan daerah;
- 6) Penyediaan bahan pembinaan operator aplikasi keuangan daerah;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan, memiliki fungsi :

- a. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan;
- b. Pengelolaan dan pengendalian dana pada rekening penerimaan, rekening kas umum daerah dan rekening pengeluaran;
- c. Pengelolaan dan pengendalian rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran;
- d. Penatausahaan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) dan daftar penguji SP2D;

- e. Penatausahaan keuangan non anggaran;
- f. Melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. Pengelolaan dan pengendalian dana transfer;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah dan Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
- 2) Penyediaan bahan administrasi dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 3) Penyediaan bahan administrasi mutasi dana antar rekening kas daerah;
- 4) Penyediaan bahan administrasi deposito dan penyertaan modal
- 5) Penyediaan bahan penetapan dan pengelolaan dana pada rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran;
- 6) Penyediaan bahan dan dokumentasi surat-surat berharga pada setiap rekening;

- 7) Penyediaan bahan pengajuan usul bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- 8) Penyediaan bahan penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) dan daftar penguji;
- 9) Penyediaan bahan verifikasi dan pengujian SP3B dan penerbitan SP2B;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

b. Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran;

Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis dana transfer dan non anggaran;
- 2) Penyediaan bahan perhitungan dana transfer berdasarkan bidang peruntukkan;
- 3) Penyediaan bahan laporan realisasi dana transfer secara berkala;
- 4) Penyediaan bahan perhitungan penerimaan dan penyetoran dana non anggaran;
- 5) Penyediaan bahan penerbitan SPM non anggaran;
- 6) Penyediaan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana;
- 7) Penyediaan bahan rekonsiliasi dana transfer dan non anggaran;

- 8) Penyediaan bahan penetapan uang daerah dan pengelolaan dana investasi daerah;
- 9) Penyediaan bahan laporan realisasi anggaran berdasarkan sumber dana secara berkala;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi, memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis akuntansi;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan secara berkala;
- d. Rekonsiliasi data Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan pencatatan;
- e. Penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala, laporan prognosis semester dua dan laporan akhir tahun;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Penyusunan nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Penyusunan data dan laporan-laporan keuangan sesuai kebutuhan;
- k. Penyusunan saldo awal rekening bendahara pengeluaran;
- l. Penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi dan Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi;

Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sistem akuntansi;
- 2) Penyediaan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- 3) Penyediaan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 4) Penyediaan bahan penyusunan nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 5) Penyediaan bahan penyesuaian penggunaan kode rekening anggaran *mapping* kode rekening akuntansi;
 - 6) Penyediaan bahan penyusunan saldo awal rekening bendahara pengeluaran;
 - 7) Penyediaan bahan dan verifikasi jurnal penyesuaian;
 - 8) Penyediaan bahan pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah;
- Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah, serta memiliki fungsi :
- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah;
 - 2) Penyediaan bahan pelaksanaan pembukuan pada buku besar penerimaan dan pengeluaran;
 - 3) Penyediaan bahan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan SKPD secara berkala;

- 4) Penyediaan bahan rekonsiliasi kesesuaian laporan keuangan dengan laporan barang milik daerah;
- 5) Penyediaan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik, laporan prognosis anggaran serta laporan akhir tahun;
- 6) Penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah;
- 7) Penyediaan bahan pengelolaan UAPPA-W atas tugas pembantuan
- 8) Penyediaan bahan rekonsiliasi data Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan pencatatan;
- 9) Penyediaan bahan data laporan dan informasi keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

5. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset, memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan dokumentasi barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan konsolidasi barang milik daerah secara periodik;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi inventarisasi barang habis pakai;

- g. Pelaksanaan penyusunan kapitalisasi, konversi dan penilaian barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan status, pengalihan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Pengendalian penggunaan soft ware/aplikasi barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan bengkel kendaraan dinas pemda;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Aset membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah dan Sub Bidang Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset dalam Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis inventarisasi, penilaian dan dokumentasi barang milik daerah;
- 2) Penyediaan bahan kegiatan inventarisasi dan sensus barang milik daerah;
- 3) Penyediaan bahan penilaian kapitalisasi, konversi, penyusutan barang milik daerah dan atau metode penilaian lainnya;

- 4) Penyediaan bahan rekonsiliasi dan verifikasi laporan inventarisasi barang milik daerah dan barang habis pakai;
 - 5) Penyediaan bahan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - 6) Penyediaan bahan pengajuan usul pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - 7) Penyediaan bahan pelaksanaan dokumentasi barang milik daerah;
 - 8) Penyediaan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Aset Daerah;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset dalam Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah;
- 2) Penyediaan bahan usul penetapan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- 3) Penyediaan bahan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyediaan bahan pengajuan usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga;

- 5) Penyediaan bahan pengajuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- 6) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan barang milik daerah;
- 7) Penyediaan bahan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

6. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan permohonan pembayaran pajak;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penilaian dan penetapan obyek pajak;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi dan pengendalian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

- f. Pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- g. Pengadaan dan pengendalian benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan uji petik operasional pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyediaan bahan pendaftaran dan nota perhitungan pengenaan serta penetapan tarif objek pajak dan retribusi daerah;

- 3) Penyediaan bahan perhitungan dan penetapan pengenaan pajak dengan jabatan (*official Assesment*);
 - 4) Penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 5) Penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian surat-surat ketetapan pajak daerah berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;
 - 6) Penyediaan bahan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 - 7) Penyediaan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Pajak Daerah;
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penagihan serta Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyediaan bahan rencana dan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- 3) Penyediaan bahan koordinasi penagihan retribusi daerah;
- 4) Penyediaan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengendalian alat pungut pajak dan retribusi daerah;

- 5) Penyediaan bahan penerbitan surat peringatan, teguran dan surat paksa atas tunggakan pajak daerah;
- 6) Penyediaan bahan pembentukan juru sita pajak daerah;
- 7) Penyediaan bahan pencatatan, pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;
- 8) Penyediaan bahan rencana pelaksanaan uji petik operasional pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;

7. Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan rekomendasi usul potensi pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan informasi pajak dan retribusi daerah
- e. Pelaksanaan iklan layanan masyarakat atas pajak dan retribusi daerah;

- f. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan wajib pajak;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

8. **Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah**

membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

a. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;

Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyediaan bahan rapat-rapat kerja dan rapat koordinasi pajak dan retribusi daerah;
- 3) Penyediaan bahan rencana penyuluhan dan informasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Penyediaan bahan rencana iklan layanan masyarakat atas pajak dan retribusi daerah;
- 5) Penyediaan bahan verifikasi dan proses atas pengajuan keberatan pajak daerah;

- 6) Penyediaan bahan usul rekomendasi atas pengajuan keberatan pajak daerah;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;
- b. Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;

Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah; dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyediaan bahan pendataan dan inventarisasi serta perhitungan nilai potensi obyek pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- 3) Penyediaan bahan rekomendasi usul penetapan potensi target pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- 4) Penyediaan bahan pemetaan dan data wajib pajak berdasarkan obyek pajak dan pendapatan asli daerah lainnya;
- 5) pendapatan asli daerah lainnya secara periodik;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;

4.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Variabel X dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntansi Berbasis Akrua (X1), dan Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) sedangkan variabel Y

yaitu Variabel Kualitas Laporan Keuangan, adapun total pertanyaan/pernyataan sebanyak 12 item dan setiap item pertanyaan/pertanyaan direspon oleh 31 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing - masing item pertanyaan / pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan / pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yakni :

$$\text{Bobot terendah X item X jumlah responden} = 1 \times 1 \times 31 = 31$$

$$\text{Bobot tertinggi X item X jumlah responden} = 5 \times 1 \times 31 = 155$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{155 - 31}{5} = 24,8 \text{ dibulatkan menjadi } 25$$

Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor setiap Item

RANGE	KATEGORI
131 - 155	Sangat besar
106 - 130	Besar
81 - 105	Sedang
56 - 80	Kecil

31 - 55	Sangat kecil
---------	--------------

Sumber : Data Olahan 2021

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing – masing indikator untuk setiap variabel adalah :

4.2.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (X1)

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Variabel Akuntansi Berbasis Akrual(X1) sebagai berikut:

Tabel. 4.2. Tanggapan Responden pada Item 1 Variabel (X1)

X1.1				
		Frequency	Skor	Valid Percent
Valid	2.00	1	2	3.2
	3.00	5	15	16.1
	4.00	15	60	48.4
	5.00	10	50	32.3
	Total	31	127	100.0

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.2. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama adalah sebanyak 10 orang responden menjawab sangat setuju atau 32,3% dari 31 responden, 15 responden atau 48,4% yang mengatakan setuju, 5 atau 16,1% responden yang mengatakan ragu-ragu, sedangkan yang menjawab ragu 1 responden atau 3.2% dan total skor pada item pertama 127, artinya ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.3. Tanggapan Responden pada Item 2 Variabel (X1)

X1.2					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	2	6.5	6.5
	2.00	2	4	6.5	12.9
	3.00	3	9	9.7	22.6
	4.00	11	44	35.5	58.1
	5.00	13	65	41.9	100.0
	Total	31	124	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.3. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 2, 13 responden atau 41,9% yang menjawab sangat setuju, 11 responden atau 35,5% yang menjawab setuju, 3 responden atau 9,7% yang mengatakan ragu-ragu setuju, 2 responden menanggapi tidak setuju dan 2 responden menanggapi dengan tidak setuju dari 31 responden dan total skor adalah 124, ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.4. Tanggapan Responden pada Item 3 Variabel (X1)

X1.3					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	4	6.5	6.5
	3.00	7	21	22.6	29.0
	4.00	17	68	54.8	83.9
	5.00	5	25	16.1	100.0
	Total	31	118	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.4. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 3, 5 orang responden atau 16,1% yang menjawab sangat setuju, 17 atau 54,8% responden yang menjawab setuju, 7 responden yang menjawab ragu-ragu

atau 22,6%, dan 2 atau 6,5% responden menjawab tidak setuju dari 31 responden, Sedangkan total skor adalah 118, ini masuk kategori besar.

4.2.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (X2)

Tabel. 4.5. Tanggapan Responden pada Item 1 Variabel (X2)

X2.1					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	15	45	48.4	48.4
	4.00	10	40	32.3	80.6
	5.00	6	30	19.4	100.0
Total		31	115	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.5. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 1. sebanyak 6 orang responden atau 19,4% yang menjawab sangat setuju, 10 orang responden atau 32,3% yang menjawab setuju, dan 15 responden atau 48,4% yang menjawab ragu - ragu dari 31 responden. Sedangkan total skor adalah 115, ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.6. Tanggapan Responden pada Item 2 Variabel (X2)

X2.2					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	18	19.4	19.4
	4.00	18	72	58.1	77.4
	5.00	7	35	22.6	100.0
Total		31	125	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.6. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 2. sebanyak 7 orang responden atau 22,6% yang menjawab sangat setuju, 18 orang responden atau 58,1% yang menjawab setuju, dan 6 responden atau

19,4% yang menjawab ragu - ragu dari 31 responden. Sedangkan total skor adalah 125, ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.7. Tanggapan Responden pada Item 3 Variabel (X2)

X2.3					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12	12.9	12.9
	4.00	15	60	48.4	61.3
	5.00	12	60	38.7	100.0
	Total	31	132	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.7. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 3. sebanyak 12 orang responden atau 38,7% yang menjawab sangat setuju, 15 orang responden atau 48,4% yang menjawab setuju, dan 4 responden atau 12,9% yang menjawab ragu - ragu dari 31 responden. Sedangkan total skor adalah 132, ini masuk kategori sangat besar.

Tabel. 4.8. Tanggapan Responden pada Item 4 Variabel (X2)

X2.4					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	33	35.5	35.5
	4.00	15	60	48.4	83.9
	5.00	5	25	16.1	100.0
	Total	31	108	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.8. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 4. sebanyak 5 orang responden atau 16,1% yang menjawab sangat setuju, 15 orang responden atau 48,4% yang menjawab setuju, dan 11 responden atau 35,5% yang menjawab ragu - ragu dari 31 responden. Sedangkan total skor adalah 108, ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.9. Tanggapan Responden pada Item 5 Variabel (X2)

X2.5					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	20	60	64.5	64.5
	4.00	6	24	19.4	83.9
	5.00	5	25	16.1	100.0
Total		31	109	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.9. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 5. sebanyak 5 orang responden atau 16,1% yang menjawab sangat setuju, 6 orang responden atau 19,4% yang menjawab setuju, dan 20 responden atau 64,5% yang menjawab ragu - ragu dari 31 responden. Sedangkan total skor adalah 109, ini masuk kategori besar.

4.2.3 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (Y)

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y), yaitu :

Tabel. 4.10. Tanggapan Responden Item 1 Variabel (Y)

Y.1					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12	12.9	12.9
	4.00	14	64	45.2	58.1
	5.00	13	65	41.9	100.0
Total		31	141	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.10. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 1 sebanyak 13 responden atau 41,9% yang menjawab sangat setuju, 14

responden atau 45,2% yang menjawab setuju, 4 responden atau 12,9% yang menyatakan ragu-ragu, dari total responden 31 dan total skor adalah 141, ini masuk kategori sangat besar.

Tabel. 4.11. Tanggapan Responden Item 2 Variabel (Y)

Y.2

		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	21	22.6	22.6
	4.00	17	68	54.8	77.4
	5.00	7	35	22.6	100.0
	Total	31	124	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.11. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 2 sebanyak 7 responden atau 22,6% yang menjawab sangat setuju, 17 responden atau 54,8% yang menjawab setuju, 7 responden atau 22,6% yang menyatakan ragu-ragu dari 31 responden dan total skor adalah 124, ini masuk kategori besar.

Tabel. 4.12. Tanggapan Responden Item 3 Variabel (Y)

Y.3

		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12	12.9	12.9
	4.00	16	64	51.6	64.5
	5.00	11	65	35.5	100.0
	Total	31	141	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.12. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 3 sebanyak 11 responden atau 35,5% yang menjawab sangat setuju dari seluruh responden, 16 responden atau 51,6% yang menjawab setuju, dan 4

responden yang menjawab ragu-ragu atau 12,9%, total skor adalah 141, ini masuk kategori sangat besar.

Tabel. 4.13. Tanggapan Responden Item 4 Variabel (Y)

Y.4					
		Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	12	36	38.7	38.7
	4.00	14	56	45.2	83.9
	5.00	5	25	16.1	100.0
	Total	31	117	100.0	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 4.13. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 4, sebanyak 5 responden atau 16,1% yang menjawab sangat setuju, dan 14 responden atau 45,2% yang menjawab setuju, 12 responden atau 38,7% menjawab ragu ragu, dan total skor adalah 117, dari seluruh responden, ini masuk kategori besar.

4.3. Pembahasan Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.435	.672		1.234	.042
ABA	.186	.089	.278	.494	.045
SPI	.874	.163	.711	.518	.000

a. Dependent Variable: KLP

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner dan dianalisis, maka persamaan regresi yang diperoleh persamaan adalah :

$$Y = 1,435 + 0,186 + 0,874$$

Dari persamaan regresi berganda ini, maka dapat diketahui bahwa nilai konstant 1,435 yang artinya, bahwa apabila Variabel akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern sama dengan nol, maka besarnya Kualitas Laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah 1,435. Koefisien X1 sebesar 0,186 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan fungsi Akuntansi Berbasis Akrual, maka Kualitas Laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato meningkat sebesar 0,186. Untuk koefisien X2 memberikan gambaran bahwa jika sistem pengendalian intern meningkat sebesar satu satuan, maka Kualitas Laporan keuangan Pada badann keuangan daerah Kabupaten Pohuwato bertambah sebesar 0,874.

4.3.1. Uji t

Uji Parsial untuk uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi antara Variabel Bebas dan Variabel terikat sebagai berikut :

Variabel Akuntansi Berbasis Akrual (X1) dengan Kualitas Laporan keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dimana t-hitung sebesar $0,494 > \text{sig. } 0,045$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dilakukan penulis signifikan. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial sebesar t.Hitung yaitu $0,518 \geq 0,000$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima berarti signifikan.

4.3.2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.160	2	1.080	.597	.000 ^b
	Residual	1.990	28	.071		
	Total	4.149	30			

a. Dependent Variable: KLP

b. Predictors: (Constant), SPI, ABA

Uji F secara simultan yang meliputi Akuntansi berbasis AkruaI dan system pengendalian intern dengan Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dimana $\alpha = 0,05$ dan $df\ n - 2$ atau $38 - 2 = 36$ diperoleh F hitung sebesar $0,597 > sig.$ Sebesar 0,000. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kontribusi akuntansi berbasis akrual X1, dan Sistem Pengendalian Intern X2 terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato yang sebesar 0,597 atau 59,70% (besar). Dan 40,30% dipengaruhi oleh Variabel lain terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Variabel akuntansi berbasis akrual (X1) memiliki pengaruh sebesar 18,60% terhadap kualitas laporan Keuangan (Y).
2. Secara parsial Variabel system pengendalian intern (X2) memiliki pengaruh sebesar 87,40% terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y).
3. Secara simultan Variabel akuntansi berbasis akrual (X1), system pengendalian intern (X2) sebesar 42,10% terhadap Laporan Pertanggungjawaban karyawan (Y).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Akuntansi berbasis Akrual perlu ditingkatkan lagi dalam hal pencatatan karena pengaruhnya rendah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. System pengendalian intern perlu dipertahankan karena mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap kualitas laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung.2012.*Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*.Bandung: Alfabeta
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi 3. Salemba 4
- Arens, Alvin A., dan James K. Loebbecke, 2000. *Auditing An Integrated Approach*, Alih Bahasa Amir Abadi Jusuf, Eighth, Jilid 1, Prentice – Hall International, Inc, New York
- Arens, A. A., dan Loebbecke, J. K. (1996). *Auditing*, buku-1. Diterjemahkan oleh Amir . Abadi Jusuf. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Baridwan, Zaki., 2000. *Intermedite Accounting*, BPFE, Yogyakarta.
- Binsar H. Simanjuntak. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia*.Jakarta : Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia
- Engkos Achmad Kuncoro dan Riduwan. (2007). *Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Penerbit : ALFABETA, Bandung.
- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.Jakarta: Salemba Empat
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Marom, Chairul. 2001. *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Erasindo
- Muna Elingga ,Supatmi, *Pengaruh Komponen Akuntansi Akrual Sebagai Prediktor Arus Kas Operasi Pada Saat Krisis Dan Setelah Krisis* , Jurnal Akuntansi/ Tahun Xii No.2 Mei 2008, 132-141
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nonce F Tuati, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Mitra, Tahun Xv, Nomor 1, April 2009

Purwaniati Nugraheni, Iman Subaweh, *Pengaruh Penerapan Sap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Sutaryo Bambang Sutopo Rahmawati, *Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Di Indonesia*, 2012

Sumardi, *Siapkah Basis Akrual Ditetapkan Pada Instansi Pemerintahan Secara Menyeluruh?*, Buletin Pengawasan Vol.5 No.2 Juni, 2008

Peraturan-peraturan :

Peraturan menteri dalam negri No. 60 tahun 2008, *tentang sistem pengendalian intern*

Peraturan menteri dalam negri No. 4 Tahun 2008, *tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan daerah*

Peraturan menteri dalam negri No.13 Tahun 2006, *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

[illegible][illegible]

Kuesioner

Hal : Permohonan Pengisian Daftar Pertanyaan

Kepada Yth.

Bapak / Ibu

Dengan hormat,

Mohon maaf sebelumnya karena disela-sela kesibukan bapak/ibu kami memohon kesediaannya untuk mengisi daftar pertanyaan sebagaimana terlampir. Daftar pertanyaan di maksud adalah sebagai bahan kami dalam menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Ichsan Gorontalo.

Kami tidak bermaksud menilai benar-salah ataupun baik-buruknya jawaban bapak/ ibu, dan jawaban yang diberikan tidak ada kaitan sama sekali dengan masa depan karir bapak/ ibu. Oleh karena itu, kami mohon jawaban yang sejujurnya sesuai dengan kondisi yang bapak/ ibu rasakan selama ini. Kerahasiaan jawaban yang diberikan kami jamin sepenuhnya, dan hanya untuk digunakan bagi kepentingan ilmiah terbatas.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi kami. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Marisa, Januari 2021

Hormat kami

FARADINA HUSAIN

A. Biodata Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

B. Pilih jawaban yang anda anggap paling benar dengan alternatif :

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju

C. Variabel Akuntansi berbasis akrual (X1)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
a.	Ditempat Bapak/Ibu bekerja pada saat transaksi mencakup nilai pendapatan, belanja dan beban.					
b.	Ditempat Bapak/Ibu bekerja pada saat pelaporan mencakup pencatatan kewajiban dan asset					
c.	Ditempat Bapak/Ibu bekerja pada saat pelaporan dengan memenuhi nilai perolehan historis					

D. Variabel system pengendalian intern

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
a.	Apakah dikantor bapak ibu bekerja selalu dilakukan pengendalian berupa nilai etika, kompetensi, kondusif, dan hubungan kerja					

	sama yang baik					
b.	Apakah dikantor bapak ibu memiliki penilaian analisis risiko dan identifikasi risiko					
c.	Apakah dikantor bapak ibu ada aktifitas pengendalian seperti pembinaan SDM, dan dokumentasi yang baik					
d.	Apakah dikantor bapak ibu mempunyai informasi dan komunikasi yang baik					
e	Apakah dikantor bapak ibu evaluasi selalu dilakukan oleh aparat pengawan intern pemerintah					

E. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
a.	Dalam pelaporan keuangan selalu dilakukan umpan balik secara tepat waktu dan dan lengkap					
b.	Penyajian laporan keuangan selalu dilakukan secara terbuka, dapat diverifikasi dan dinetralisir					
c.	Laporan keuangan dikantor bapak ibu bekerja bisa dibandingkan secara intern dan eksternal					
d.	Laporan keuangan dikantor bapak ibu bekerja dapat dipahami oleh para pengguna					

VARIABEL X1 (Akuntansi Berbasis Akrual)

NO				TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3		
1	3	4	3	10	3.33
2	4	5	5	14	4.67
3	4	1	4	9	3.00
4	5	5	4	14	4.67
5	4	5	4	13	4.33
6	5	5	3	13	4.33
7	4	1	4	9	3.00
8	4	4	4	12	4.00
9	2	4	4	10	3.33
10	5	4	5	14	4.67
11	4	3	4	11	3.67
12	4	4	4	12	4.00
13	3	5	4	12	4.00
14	3	4	3	10	3.33
15	4	5	5	14	4.67
16	4	5	2	11	3.67
17	5	5	4	14	4.67
18	4	5	4	13	4.33
19	5	5	3	13	4.33
20	4	5	4	13	4.33
21	4	4	4	12	4.00
22	5	4	4	13	4.33
23	5	4	5	14	4.67
24	4	3	4	11	3.67
25	4	4	4	12	4.00
26	3	5	4	12	4.00
27	4	2	3	9	3.00
28	5	5	3	13	4.33
29	3	3	3	9	3.00
30	5	4	2	11	3.67
31	5	2	5	12	4.00
JML	127	124	118	369	123.00

VARIABEL X2 (Sistem Pengendalian Intern)

NO	ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN					TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3	4	5		
1	3	4	5	3	3	18	3.6
2	5	3	4	3	3	18	3.6
3	4	4	5	4	5	22	4.4
4	4	4	4	4	4	20	4.0
5	3	5	4	3	5	20	4.0
6	3	4	4	4	3	18	3.6
7	3	4	3	4	3	17	3.4
8	5	4	4	4	3	20	4.0
9	3	4	5	4	3	19	3.8
10	4	4	4	3	3	18	3.6
11	4	3	5	5	3	20	4.0
12	3	5	3	3	4	18	3.6
13	4	5	5	5	3	22	4.4
14	3	4	4	4	3	18	3.6
15	5	3	4	5	4	21	4.2
16	5	3	5	3	5	21	4.2
17	3	5	4	4	4	20	4.0
18	3	4	5	3	3	18	3.6
19	5	3	4	3	3	18	3.6
20	4	4	5	4	5	22	4.4
21	4	4	4	4	4	20	4.0
22	3	5	4	3	5	20	4.0
23	3	4	4	4	3	18	3.6
24	3	4	3	4	3	17	3.4
25	5	4	4	4	3	20	4.0
26	3	4	5	4	3	19	3.8
27	4	4	4	3	3	18	3.6
28	4	3	5	5	3	20	4.0
29	3	5	3	3	4	18	3.6
30	3	4	5	4	3	19	3.8
30	4	5	5	5	3	22	4.4
JML	115	125	132	118	109	599	119.8

VARIABEL Y (Kualitas Laporan Keuangan)

NO					TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3	4		
1	5	4	5	3	17	4.25
2	4	3	4	3	14	3.50
3	5	4	5	4	18	4.50
4	4	4	4	4	16	4.00
5	3	5	4	3	15	3.75
6	5	4	4	4	17	4.25
7	5	4	3	4	16	4.00
8	4	4	4	4	16	4.00
9	5	4	5	4	18	4.50
10	4	4	4	3	15	3.75
11	4	3	5	5	17	4.25
12	4	5	3	3	15	3.75
13	5	5	5	5	20	5.00
14	5	4	4	4	17	4.25
15	4	3	4	5	16	4.00
16	5	3	5	3	16	4.00
17	4	5	4	4	17	4.25
18	3	4	5	3	15	3.75
19	4	3	4	3	14	3.50
20	5	4	5	4	18	4.50
21	4	4	4	4	16	4.00
22	5	5	4	3	17	4.25
23	3	4	4	4	15	3.75
24	4	4	3	4	15	3.75
25	5	4	4	4	17	4.25
26	4	4	5	4	17	4.25
27	4	4	4	3	15	3.75
28	3	3	5	5	16	4.00
29	4	5	3	3	15	3.75
30	5	3	4	3	15	3.75
31	5	5	5	5	20	5.00
JML	133	124	131	117	505	126.3

```
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3
```

```
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created	08-NOV-2021 07:12:47	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	31
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.03

[DataSet0]

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3
N	Valid	31	31	31
	Missing	0	0	0

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.2	3.2	3.2
	3.00	5	16.1	16.1	19.4
	4.00	15	48.4	48.4	67.7
	5.00	10	32.3	32.3	100.0

Total	31	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	6.5	6.5	6.5
2.00	2	6.5	6.5	12.9
3.00	3	9.7	9.7	22.6
4.00	11	35.5	35.5	58.1
5.00	13	41.9	41.9	100.0
Total	31	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	6.5	6.5	6.5
3.00	7	22.6	22.6	29.0
4.00	17	54.8	54.8	83.9
5.00	5	16.1	16.1	100.0
Total	31	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies**Notes**

Output Created	08-NOV-2021 07:15:11	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	31
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used		Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
		/ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N	Valid	31	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	15	48.4	48.4	48.4
	4.00	10	32.3	32.3	80.6
	5.00	6	19.4	19.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	19.4	19.4	19.4
	4.00	18	58.1	58.1	77.4
	5.00	7	22.6	22.6	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12.9	12.9	12.9
	4.00	15	48.4	48.4	61.3
	5.00	12	38.7	38.7	100.0

Total	31	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	35.5	35.5	35.5
	4.00	15	48.4	48.4	83.9
	5.00	5	16.1	16.1	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	20	64.5	64.5	64.5
	4.00	6	19.4	19.4	83.9
	5.00	5	16.1	16.1	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes

Output Created	08-NOV-2021 07:16:46	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	31
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4
		/ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Statistics

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
N	Valid	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table**Y.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12.9	12.9	12.9
	4.00	14	45.2	45.2	58.1
	5.00	13	41.9	41.9	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	22.6	22.6	22.6
	4.00	17	54.8	54.8	77.4
	5.00	7	22.6	22.6	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	12.9	12.9	12.9
	4.00	16	51.6	51.6	64.5
	5.00	11	35.5	35.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	12	38.7	38.7	38.7
	4.00	14	45.2	45.2	83.9
	5.00	5	16.1	16.1	100.0
Total		31	100.0	100.0	

REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT KLP

/METHOD=ENTER ABA SPI.

Regression**Notes**

Output Created	08-NOV-2021 07:22:07	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	31
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

Syntax	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
		REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KLP /METHOD=ENTER ABA SPI.
Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.28
	Memory Required	1636 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KLP	4.0726	.37190	31
ABA	3.9677	.55395	31
SPI	3.8645	.30282	31

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SPI, ABA ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KLP

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.721 ^a	.421	.486	.26656	.521	.597	2	28	.000

a. Predictors: (Constant), SPI, ABA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.160	2	1.080	.597	.000 ^b

Residual	1.990	28	.071		
Total	4.149	30			

a. Dependent Variable: KLP

b. Predictors: (Constant), SPI, ABA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

19191/PIP/LEMLIT-UNISAN/V/2021

a yang bertanda tangan di bawah ini:


ma : Zulham, Ph.D
DN : 0911108104
abatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

eminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
roposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Faradina Husain
NIM : E1119159
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian : Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua dan system pengendalian
intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 01 Mei 2021


Zulham, Ph.D
NIDN: 0911108104



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Kompleks Blok Plan Kec. Marisa Telp. (0443) 210484

SURAT KETERANGAN

Nomor.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato Menerangkan Bahwa Sesungguhnya Saudara/I :

Nama : Faradina Husain
 NIM : E1119157
 Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
 Fakultas : Ekonomi
 Prodi : Akuntansi
 Keterangan : Telah Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Penelitian Pengambilan secara Deskriptif

Mahasiswa Tersebut Benar – benar Melakukan Kegiatan di Badan Keuangan Daerah Pada tanggal 10 maret sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 dengan judul **Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistim Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pohuwato, 10 Mei 2021

An. KEPALA BKD
 SEKRETARIS


PETI ALAMRI, SE
 NIP. 19740109 200312 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0901/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FARADINA HUSAIN
NIM : E1119159
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan studi kasus pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



revisi faradina husain.docx
Nov 13, 2021
11122 words / 72179 characters

E:11.19.159

Skripsi_faradina husain.docx

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	elib.unikom.ac.id	INTERNET	8%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id	INTERNET	1%
3	text-id.123dok.com	INTERNET	1%
4	id.123dok.com	INTERNET	1%
5	repositori.usu.ac.id	INTERNET	1%
6	es.scribd.com	INTERNET	<1%
7	kapswd.blogspot.com	INTERNET	<1%
8	media.neliti.com	INTERNET	<1%
9	ojs.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
10	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
11	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
12	syukriy.wordpress.com	INTERNET	<1%
13	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
14	adeletom.blogspot.com	INTERNET	<1%
15	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
16	dir.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
17	gorontalo.kab.go.id	INTERNET	<1%
18	journal.umgo.ac.id	INTERNET	<1%
19	www.stiestembi.ac.id	INTERNET	<1%
20	ejournal.stienusa.ac.id	INTERNET	<1%
21	e-repository.unsyiah.ac.id	INTERNET	<1%
22	repository.stieykp.ac.id	INTERNET	<1%

11/13/21, 12:12 PM

Skripsi_taradina husain.docx - E:11.19.159

23	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
25	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
26	edoc.pub	INTERNET	<1%
27	journal.unsil.ac.id	INTERNET	<1%
28	pidiejayakab.go.id	INTERNET	<1%
29	thesis.binus.ac.id	INTERNET	<1%
30	www.scribd.com	INTERNET	<1%
31	dppkad.tanjabbarkab.go.id	INTERNET	<1%
32	underground-paper.blogspot.com	INTERNET	<1%
33	www.iainglobal.or.id	INTERNET	<1%
34	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
35	dppkad.gorentalokab.go.id	INTERNET	<1%
36	hukum.unsrat.ac.id	INTERNET	<1%
37	www.bpk.go.id	INTERNET	<1%
38	jambiketa.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- None

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama : FARADINA HUSAIN
 NIM : E11. 19.169
 Tempat/Tgl Lahir: Marisa, 27 Juli-1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Angkatan : 2019
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Akuntansi
 Agama : Islam
 Alamat : Desa.Buntulia Utara,
 Kec.Buntulia Kab.Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 01 Buntulia pada tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan Ke jenjang selanjutnya Yakni di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Duhiadaa dan Lulus Pada tahun 2014
3. Kemudian Melanjutkan Ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Marisa dan Lulus pada Tahun 2017
4. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konfersi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Allhamdulillah pada tahun 2021 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo